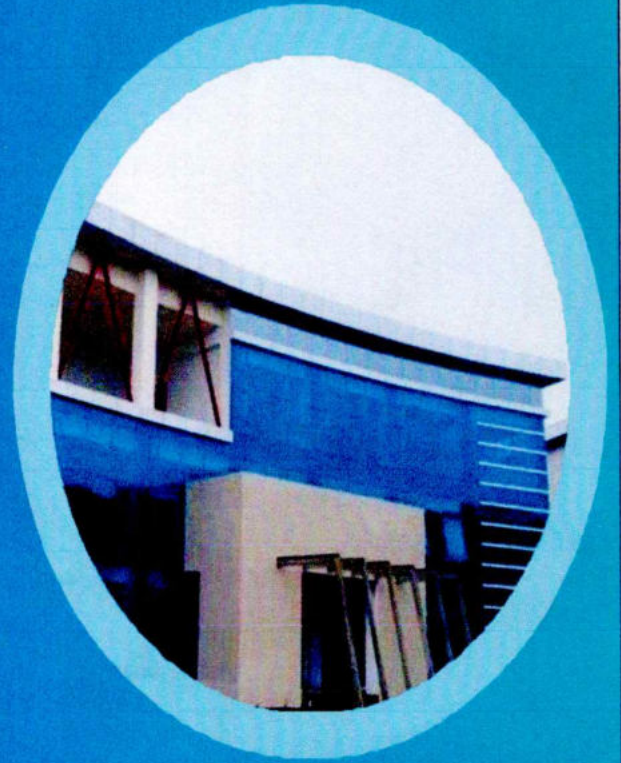






LAPORAN KINERJA (LKj) 2023




DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA

Jl. Achmad Amins Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang

 dpuprkotasamarinda@gmail.com

 <https://pupr.samarindakota.go.id>

 0541-203785

 0541-732072

DAFTAR ISI

Halaman		
KATA PENGANTAR	i - ii	
DAFTAR ISI.....	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. U M U M.....	1
	B. KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1
	C. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
	D. PERMASALAHAN	4
	E. ISU STRATEGIS.....	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	7
	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	8
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	18
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
	1. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN.....	18
	2. ANALISIS HAMBATAN/PERMASALAHAN	39
	B. REALISASI ANGGARAN.....	40
BAB IV	PENUTUP	42
LAMPIRAN		
	1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026	
	2. PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja yang harus disusun oleh instansi/lembaga sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun untuk menjawab capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu instansi sesuai dengan peran tugas dan fungsinya serta capaian kinerja untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada Tahun 2023 dapat terwujud.

LKj ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kebijakan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang memberi arah segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam melaksanakan berbagai aktivitas pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Laporan Kinerja (Lkj) ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Informasi Laporan Kinerja ini dapat menjadi referensi utama untuk evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dan akhirnya diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta semua pihak yang terkait.

Samarinda, 15 Januari 2024

Kepala,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Samarinda



DESY DAMAYANTI, ST, MT
NIP. 19711017200112205

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Samarinda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Samarinda melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

“Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A” dibentuk menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 4 Tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016

Selanjutnya 31 Desember 2021 Peraturan Wali Kota Samarinda No. 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

B. KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda”, bahwa tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi dan Bidang Pertanahan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda mempunyai fungsi :

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
- c. Pengawasan dan pengendalian di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayananan masyarakat, Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional ;
- d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Bina Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Bidang Pertanahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- j. UPTD.

D. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan Infrastruktur Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kualitas infrastruktur kota	Luas daerah rawan genangan	Pendangkalan saluran drainase dan sungai alam dan sungai
			Tidak berfungsinya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat
		Belum optimalnya jaringan irigasi	Alih Fungsi Lahan daerah resapan air
			Kurang tersedianya saluran jaringan irigasi
		Belum optimalnya kualitas gedung pemerintah	Kurang ketersediaannya air penampung untuk irigasi
			Kurang ketersediaannya air baku untuk irigasi
Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan air minum yang aman	Alih Fungsi Lahan daerah irigasi		
	Masih banyak Perangkat Daerah tidak memiliki kantor/sewa		
Belum optimalnya penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai	Masih banyak gedung pemerintah yang rusak		
	Belum optimal jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan		
2	Belum terpenuhinya acuan dasar penyelenggaraan penataan ruang	Tidak sesuai rencana pemanfaatan pola ruang dengan kondisi eksisting di lapangan	Masih maksimal penyehatan lingkungan suatu kawasan permukiman dengan sistem pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase
			Penyalahgunaan peruntukan Tata Ruang dan Pelanggaran Perizinan
		Belum terpenuhinya Aturan dalam Pelaksanaan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap Perda tentang RTRW
			Belum lengkapnya dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW, RDTR) kota & rencana teknis kota lainnya.
			Belum tersedianya Dasar Perijinan yang lebih detail (PZ) peraturan zonasi
			Belum terpenuhinya RTH Publik sebagaimana diamanatkan UU PR
Belum tersedianya sistem informasi tata ruang			

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Daya dukung dan daya tampung lahan atasi banjir.
2. Konektifitas dan kondisi jalan yang mantap untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Pertumbuhan penduduk Kota Samarinda semakin tinggi memerlukan dukungan terhadap prasarana sarana dan utilitas.
4. Pemenuhan sarana prasarana daerah irigasi untuk mendukung lahan pertanian berkelanjutan.
5. Pemenuhan tenaga terampil yang bersertifikasi.

6. Kebutuhan ruang kota yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dan arahan pengembangan yang tertuang dalam perundang-undangan.
7. Penyelenggaraan, pemanfaatan ruang berbasis IT dan implementasi *one map policy*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Menurut Keputusan Walikota Samarinda Nomor 051/327/HK-KS/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama yang ditetapkan merupakan suatu kinerja yang akan dapat dicapai oleh organisasi, sehingga dalam perjanjian kinerja perlu dipertimbangkan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil dan manfaat, dibuat perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023.

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	1 Rasio Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	40,00 %
		2 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	82 %
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	1 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	78,14 %
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan SPALD	1 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1 %
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah melalui Infrastruktur Persampahan	1 Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	25 %
5	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Regulasi dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	2,73 %
		2 Rasio Tenaga Operator/Teknis/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	10 %
6	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dari Pusat Produksi ke Pusat Kegiatan	1 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	65 %
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2 %
8	Meningkatkan Pemanfaatan Tanah Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	1 Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukan Tanahnya diatas Izin Lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	74,18 %
9	Meningkatnya Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	1 Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan fasilitas umum	51.79 %
		2 Tersedianya tanah untuk masyarakat	100 %
		3 Penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

No	Program	Anggaran (Rp).
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.283.694.432
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	109.226.631.270
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	70.739.106.345
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	26.854.625.000
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.183.450.000
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	378.288.186.842
7	Program Penataan Bangunan Gedung	397.531.970.777
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	200.000.000
9	Program Penyelenggaraan Jalan	602.079.457.122
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.700.000.000
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.652.000.000
12	Program Pengelolaan Izin Lokasi	50.000.000
13	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	45.000.000
14	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	78.106.253.000
15	Program Pengelolaan Tanah Kosong	30.000.000
16	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	975.000.000
	J u m l a h	1.707.945.374.788

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	1. Rasio Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	40%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82 %	
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			0.10 Km	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
			1 Unit	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
			5 Unit	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
			3 Unit	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
			4 Unit	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
			2 Unit	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			11 Dok	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
			1 Km	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
			2 Km	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
			13 Unit	Operasional Unit Pengelola Irigasi
				PROGRAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Daerah Kabupaten/Kota
			37 Dok	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
			8000 M	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
			20000 M	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
			20000 M	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	78,14 %	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			1 Dok	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
			5 Ltr/Dtk	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			10 Ltr/Dtk	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			100 SR	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan SPALD	1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengolahan Air	1 %	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Limbah Domestik		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			1 Dok	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			45 Rumah Tangga	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
			50 Rumah Tangga	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			25 M3/Hari	Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT (UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik)
			2 Unit	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			100 Septic Tank	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah melalui Infrastruktur Persampahan	1. Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	25 %	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
			2 Dok	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
			900 RT	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			60 Unit	Penyediaan Sarana Persampahan
5	Meningkatnya Ketaatan terhadap Regulasi dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	2,73 %	
		2. Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	10 %	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
			2 Dok	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
			3 Dok	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
			10 Bangunan	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
6	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dan Pusat Produksi ke Pusat Kegiatan	1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	65 %	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
			2 Dok	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			500 M2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
			5 Dok	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
			2000 M	Pembangunan Jalan
			2000 M	Rehabilitasi Jalan
			15 M	Pembangunan Jembatan
			200 M	Pembangunan Terowongan/ Tunnel
			15 M	Rehabilitasi Jembatan
			100 M	Pemeliharaan Rutin Jembatan
			1000 M	Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
			3 Dok	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
			2 Dok	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
			2 Kecamatan	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			2 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			1 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			1 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
			1 Dok	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
			190 Org	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
			190 Org	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			1 Dok	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
			1 Dok	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
			100 Org	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
			1 Laporan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
8	Meningkatkan Pemanfaatan tanah sesuai dengan izin yang diterbitkan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	74,18	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
				Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			9 SK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
9	Meningkatnya Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,79	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			1 Laporan	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			5 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
				Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1 Dok	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
				Penerbitan Izin Membuka Tanah
			56 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Evaluasi Pencapaian Kinerja

Pengukuran Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dapat digambarkan secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian Kinerja.

Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	1. Rasio Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	40,00	44,64	111,6
		2. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	82	82	100
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten/Kota	78,14	91,12	116,61
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan SPALD	1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1	1	100
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah melalui Infrastruktur Persampahan	1. Persentase Infrastruktur Persampahan yang Dibangun	25	22	88

5	Meningkatnya Ketaatan terhadap Regulasi dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	2,73	11,03	404,03
		2. Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	10	14,41	144,1
6	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dari Pusat Produksi ke Pusat Kegiatan	1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	65	85,62	131,72
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	0,2	100
8	Meningkatkan Pemanfaatan tanah sesuai dengan izin yang diterbitkan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	74,18	0	Tidak dilaksan akan
9	Meningkatnya Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	1. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,79	51,79	100
		2. Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	100	100
		3. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100

Indikator kinerja tersebut dapat tercapai melalui program/kegiatan/Sub Kegiatan :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	81,50 - B	81,50 - B	81,50 - B
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	82	82	
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 laporan	2 laporan	
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	135 orang	135 orang	135 orang
1	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang dibayarkan	156 Orang	156 Orang	156 Orang
1	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 laporan	2 laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	1	2.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan
1	3	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	4 laporan	4 laporan	
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	19 Jenis
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik	5 Jenis	2 Jenis	4 Jenis
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
1	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah rombongan tamu yang berkunjung	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	60 SPPD	60 SPPD	158 SPPD
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	1 laporan	1 laporan	
1	3	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan	4 Unit	4 Unit	2 Unit
1	3	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	1 Unit	1 Unit	18 Jenis
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 laporan	1 laporan	
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum	4 laporan	4 laporan	3 laporan
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	1 laporan	1 laporan	
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	4 unit	1 unit	1 Unit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	145 unit	145 Unit	145 Unit
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin	24 Unit	24 Unit	30 Unit
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung	4 Gedung	4 Gedung	1 Gedung
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luasan kawasan permukiman rawab banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40%	40%	
						Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82%	82%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dibangun	800 M	800 M	
1	3	2	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing	100 Meter	0,10 Km	0,635 Km
1	3	2	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah pembangunan polder/kolam retensi	1 Unit	1 Unit	0 Unit (alasan: tender gagal karena penyedia tidak memenuhi kompetensi jadi akan diadakan tender ulang Januari 2023)
1	3	2	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	2 Unit	5 Unit	5 Unit
1	3	2	2.01	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	3 Unit	3 Unit	3 Unit
1	3	2	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Rehabilitasi pompa	1 Unit	4 Unit	4 Unit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	2	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Rehabilitasi polder/kolam retensi	1 Unit	2 Unit	2 Unit
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/ direhabilitasi	13%	13%	
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen	1 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	1000 M	1000 M	278 M (alasan: karena dana yang tersedia tidak bisamemenuhi target, target awal terlalu tinggi)
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	1000 M	2000 M	560 M
1	3	2	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Panjang irigasi	2.500 M	13 Unit	13 Unit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akes terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	78,14%	78,14%	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota.	500 SR	500 SR	
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	3	2.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa	3 Km Pipa	5 Ltr/Dtk	10 Ltr/Dtk
1	3	3	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa	3 Km Pipa	10 Ltr/Dtk	20 Ltr/Dtk

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa	1 KM pipa	100 SR	110 SR
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%	25%	25%
1	3	4	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 Bangunan	1 Bangunan	
1	3	4	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	50 Paket	2 Dokumen	3 Dokumen
1	3	4	2.01	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3 Bangunan	900 RT	64 Bangunan
1	3	4	2.01	6	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Sampah	5 Buah	60 Unit	115 Unit
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.00	1.00	1.00
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pengolahan air limbah domestik	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	5	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen
1	3	5	2.01	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Pasangan Sambungan Rumah	-	45 Rumah Tangga	74 Rumah Tangga
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan	100 Unit	50 Rumah Tangga	239 Rumah Tangga
1	3	5	2.01	15	Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Rumah Tangga	100 Septic Tank	25 M3/Hr	10 M3/Hr
					(UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik)				
1	3	5	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air	Pemeliharaan	20 Unit	2 Unit	2 Unit
1	3	5	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga	1 Unit	100 Septi Tank	100 Septi Tank
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	55%	55%	55%
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun & direhabilitasi	3000 M	7000 M	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase	200 M	8000 M	11115,9 M
1	3	6	2.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase	200 M	20.000 M	2848,3 M
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Rehabilitasi drainase	2000 M	20.000 M	40.000 M
	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1.60%	2.73%	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah advice IMB/SLF/TABG	500 Advice	500 Advice	
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	74 Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan	2 Bangunan	3 Dokumen	111 Bangunan
1	3	8	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan	4 Bangunan	10 Unit	35 Bangunan
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kecamatan	2 Kecamatan	
1	3	9	2.01	5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	10 Kecamatan
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65.00%	65.00%	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun dan direhabilitasi	3200 M	3200 M	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	90 Dokumen
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Luas Lahan/ Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	500 M2	500 M2	10.000 M2
1	3	10	2.01	4	Survei Kondisi Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Mengenai Kondisi Jalan/ Jembatan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	300 M	2000 M	20.617,2 M (Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya perbedaan penanganan pada beberapa kegiatan yang mempengaruhi panjang efektif yang dapat dilaksanakan)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Yang Di rehabilitasi	1000 M	2000 M	78.355,3 M (alasan: adanya beberapa kegiatan yang memerlukan item kegiatan tambahan sebagai penunjang dikegiatan tersebut sehingga mengurangi panjang efektif jalan yang dapat diperbaiki)
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan Yang Dibangun	15 M	15 M	16 M
1	3	10	2.01	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Panjang terowongan/Tunnel	100 M	200 M	270 M
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik	15 M	15 M	366,9 M (Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya perbedaan typical penanganan pada beberapa kegiatan yang mempengaruhi panjang efektif yang dapat dilaksanakan)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terjaganya Jembatan Dalam Kondisi Baik	100 M	100 M	1523,2 M (Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya perbedaan typical penanganan pada beberapa kegiatan yang mempengaruhi panjang efektif yang dapat dilaksanakan)
1	3	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah Bencana/Keadaan Darurat Yang Ditanggulangi	1000 M	1000 M	4848,51 M (Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya perbedaan typical penanganan pada beberapa kegiatan yang mempengaruhi panjang efektif yang dapat dilaksanakan)
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	10%	10%	
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	500 Orang	500 Orang	
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Orang	50 org	190 org	190 org

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	11	2.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Orang	350 org	190 org	188 org
1	3	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang	6 Dokumen	6 Dokumen	
1	3	11	2.02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	11	2.02	8	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pengawasan yang dilakukan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
1	3	11	2.04	2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen	200 org	100 org	108 org
1	3	11	2.04	2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.2	0.2	0.2
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang	0.2%	0.2%	0.2%
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Substansi RDTR	-	3 Dokumen	3 Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rancangan Peraturan Bidang Penataan Ruang	2 Perwali	2 Dokumen	2 Dokumen
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	1 Kota
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Matek dan Raperda	2 Dokumen	2 Dokumen	
1	3	12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Matek dan Raperda	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen Alasan: kegiatan yang dikerjakan hanya ada 1)
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	0.2 Nilai	0.2 Nilai	
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Teknis Kesesuaian Tata Ruang	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal	0.2 Nilai	0.2 Nilai	
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Penertiban Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang di terbitkan	74,18 %	74,18 %	
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan	9 SK	9 SK	1 SK
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan	9 SK	9 SK	9 SK
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan melalui Mediasi	100%	100%	100%
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang Ditangani/Mediasi	5 Kasus	5 Kasus	0 Kasus
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasum	51,79 %	51,79 %	
2	10	5	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti Rugi dan Santunan Tanah	120 Ha	120 Ha	
2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
2	10	8			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Luas Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	13%	13%	3%
2	10	8	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Luas Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	1.500.407 M2	1.500.407 M2	
2	10	8	2.02	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Kecamatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
2	10	9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	72,72 %	72,72 %	
2	10	9	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) diterbitkan	56 Surat	56 Surat	
2	10	9	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	56 Dokumen	56 Dokumen	56 Dokumen

2. Analisis Hambatan/Permasalahan

Selain hambatan/permasalahan dalam kolom 6 tabel di atas, terhadap capaian kinerja masih terdapat hambatan/permasalahan lainnya yaitu :

1. Ada beberapa perbaikan indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Proses P-APBD yang waktunya terbatas/kurang guna menyelesaikan administrasi dan fisik kegiatan.
3. Faktor sosial/pembebasan lahan belum diselesaikan terlebih dahulu.

Beberapa hambatan/permasalahan tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dengan percepatan pelaksanaan disamping itu juga melalui sosialisasi kegiatan.

Sedangkan solusi penyelesaian kinerja terhadap hambatan/permasalahan adalah :

1. Perbaiki Indikator Kinerja Utama yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar dapat diukur Program/kegiatannya.
2. P-APBD diutamakan pada pekerjaan Non Fisik atau pekerjaan mendesak/darurat.
3. Penyelesaian masalah sosial sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.
4. Lebih Terarahnya dan fokus pada program/kegiatan yang prioritas untuk mendukung Indikator Kinerja Utama.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dan tercapainya indikator kinerja telah didukung anggaran sebesar Rp. 1.707.945.374.788,00 dengan realisasi Rp. 1.619.985.270.797,00 sisa anggaran Rp. 87.960.103.991,00 secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut :

Laporan Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.283.694.432,00	26.669.647.625,00	97,75
2	Program Pengelolaan SDA	109.226.631.270,00	78.040.405.249,00	71,45
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	70.739.106.345,00	70.166.660.338,00	99,19
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	26.854.625.000,00	26.538.702.400,00	98,82
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.183.450.000,00	10.055.871.780,00	98,46
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	378.288.186.842,00	373.101.089.910,00	98,63
7	Program Penataan Bangunan Gedung	379.531.970.777,00	374.611.433.858,00	94,23
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200.000.000,00	199.051.600,00	99,53
9	Program Penyelenggaraan Jalan	602.079.457.122,00	589533.727.688,00	97,92
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.700.000.000,00	1.677.640.893,00	98,68
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.652.000.000,00	4.473.735718,00	96,17
12	Program Pengelolaan Izin Lokasi	50.000.000,00	18.656.000,00	37,31
13	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	45.000.000,00	13.088.100,00	29,08
14	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	78.106.253.000,00	63.944.681.199,00	81,87
15	Program Pengelolaan Tanah Kosong	30.000.000,00	7.717.000,00	25,72
16	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	975.000.000,00	933.161.439,00	95,71
	Total	1.707.945.374.788,00	1.619.985.270.797,00	94,85

Sumber :SIPD dan FMIS

Uraian analisis anggaran	Jumlah
Pagu anggaran yang tersedia	: Rp. 1.707.945.374.788,00
Realisasi	: Rp. 1.619.985.270.797,00
Sisa anggaran	: Rp. 87.960.103.991,00

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2023. LKj disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan/sasaran dan indikator Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kinerja.

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada Tahun 2023 umumnya menggambarkan realisasi kinerja yang telah dicapai terdiri dari 16 (enam belas) Program, 28 (dua puluh delapan) Kegiatan dan 81 (delapan puluh satu) Sub Kegiatan dari sumber dana APBD Kota, Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim dan Dana Alokasi Khusus, 8 (delapan) Sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja. Bahwa alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 1.707.945.374.788,00, Realisasi Anggaran Rp. 1.619.985.270.797,00 , Sisa Anggaran Rp. 87.960.103.991,00, kegiatan dan program telah berhasil mencapai sasaran dengan pencapaian persentase kegiatan fisik 98,30 % dan keuangan 94,85 %

Namun demikian, masih terdapat kelemahan terutama dalam sistem pengukuran kinerja. Kelemahan tersebut antara lain :

1. Belum adanya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai yang mampu mendukung “*Data Base Management System*” dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj).
2. Belum adanya standar kinerja yang valid dan akurat antara tujuan/sasaran kinerja sehingga seringkali indikator kinerja utama yang ditetapkan, antara satuan pengukuran kinerja *outcome* masih banyak menggunakan % (*persentase*) dan bersifat “*Uncontrollable*”./tidak terukur
3. Belum adanya “*Benchmark*” (pembanding dari instansi sejenis) yang dapat dijadikan : “*Best Value Measurement*” dalam pengukuran kinerja.

Disamping perbaikan yang perlu dilakukan pada beberapa indikator kinerja utama tertentu baik pada level sasaran maupun level kegiatan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan sistem sasaran strategis itu sendiri. Perbaikan atas sistem pengukuran kinerja yang perlu dilakukan adalah :

1. Merancang dan membangun sistem pengumpulan data kinerja yang memadai sebagai “*Data Base Management System*” sehingga mampu menyajikan data-data kinerja secara cepat dan akurat baik untuk keperluan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) maupun untuk keperluan pengambilan keputusan manajemen.
2. Merancang dan membangun standar kinerja maupun “*Benchmark*” yang dapat dijadikan sebagai “*Best Value Measurement*” sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat dibandingkan dengan baik dan memadai (*eligible*).

Akhirnya besar harapan kami Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2023 ini mampu dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta dapat dijadikan sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang baik dimasa yang akan datang, yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa adanya perbaikan-perbaikan diberbagai sasaran dan kegiatan sebagaimana dijelaskan diatas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* yang melibatkan *Stake Holder* sehingga kedepan akan tercipta sasaran strategis dan indakator kerja

utama dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu berkat kerja keras serta ketekunan Tim Penyusun dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka LKj ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai wujud transparansi terhadap masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2021-2026. IKU ini bertujuan untuk menetapkan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda untuk mencapai indikator sasaran.

Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil review dan adanya perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi.

Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan capaian kinerja guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah, Khususnya Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Semoga Indikator Kinerja Utama ini bermanfaat bagi tercapainya tata kelola organisasi dan keuangan yang baik dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Samarinda, 2 Januari 2022

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Samarinda

KEPALA DINAS,



Ir. HERO MARDANUS SATYAWAN., MT

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19660330 199303 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Kedudukan dan susunan organisasi Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan wajib pemerintah bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi, dan Bidang Pertanahan
2. Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum , penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
 - c. Pengawasan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung pembangunan di Kota Samarinda, terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita - cita pembangunan daerah. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna yang pada akhirnya secara bertahap kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Salah satu langkah awal dalam perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Pemilihan dan

penetapan Indikator Kinerja Utama harus mempertimbangkan / berpedoman beberapa hal yaitu :

1. RPJMD, Rencana Strategik, Kebijakan Umum atau Dokumen Strategis lainnya.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi.
3. Kebutuhan informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan data statistik pemerintah.
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon II/ OPD sekurang- kurangnya adalah sampai Indikator Keluaran (*Output*) saja.

Atas dasar itulah Indikator Kinerja Utama disusun pada tahap awal dan itu dipergunakan untuk perencanaan sampai 5 tahun kedepan dan juga merupakan pedoman dari instansi pemerintah untuk bertanggungjawabkan hasil kinerja dari pada pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah mewajibkan untuk setiap instansi pemerintah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas masukan (*input*), keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Penyusunan IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Maksud

Penyusunan IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dengan maksud agar dapat direncanakan akuntabilitas kinerja dari program dan kegiatan dalam tahun mendatang yang berorientasi kepada pencapaian hasil sesuai dengan visi dan misi.

b. Tujuan

Adapun tujuannya adalah tersusunnya IKU Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda secara baik. Selain itu, juga untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda merupakan Acuan dasar Laporan Kegiatan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang berfungsi sebagai penentuan keberhasilan sasaran strategis pada instansi.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Republik Indonesia tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 - 2034;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;+
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda; dan
19. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.
20. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

BAB II

PENGETERIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran atas indikator yang akan memberikan informasi sejauhmana telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dari instansi pemerintah. Kata kinerja (performance) dalam konteks tugas sama artinya dengan prestasi kerja.

Jadi, dari uraian diatas dapat diartikan Indikator Kinerja Utama adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi atau pekerjaan atau kegiatan tertentu selama waktu tertentu. Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang akan dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau apa saja yang keluar (*outcome*)

Pemilihan dan penetapan indicator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

1. **Spesifik**, diuraikan secara detail dan fokus sesuai dengan tupoksi instansi.
2. **Dapat dicapai**, target yang ditetapkan merupakan realistis dan dapat dicapai (*achivable*) ada nilai atau hasil peningkatan.
3. **Relevan**, aspek yang dipilih merupakan aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok.

2.2. Penggunaan Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama digunakan Instansi Pemerintah untuk :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan.
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja.
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
5. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah.
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1 Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda

Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Kota Samarinda yang terpilih untuk masa bakti 2021-2026 adalah:

- a. **Visi**
Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban
- b. **Misi**
Untuk melaksanakan Visi tersebut, diterapkan misi sebagai berikut :
 - Misi 1 Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
 - Misi 2 Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
 - Misi 3 Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat;
 - Misi 4 Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
 - Misi 5 Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

3.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Untuk mencapai tujuan dalam penjabaran atas Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang selama periode lima tahun kedepan adalah :

1. Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air.
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni.
3. Meningkatnya kebersihan wilayah kota.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
5. Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota.
6. Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas.

b. **Sasaran**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air
 - Meningkatkan upaya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni
 - Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM
 - Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPALD
3. Meningkatkan kebersihan wilayah kota
 - Meningkatkan pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 - Meningkatkan ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
 - Meningkatkan ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
5. Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota
 - Meningkatkan ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
6. Meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas
 - Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategis

a. **Strategi**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda. Peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam mewujudkan Visi dan Misi tertuang dalam Misi ke 4 Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern dan Misi ke 5 Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran dalam mencapai pembangunan Kota Samarinda lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan pada tabel 3.1.

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kota Samarinda dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban			
Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan	Penyediaan penganggaran jalan infrastruktur

Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban			
Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air	Meningkatkan pengelolaan pengembangan sumber daya air	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air	Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air
Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kawasan perumahan dan permukiman	Penataan, pengembangan, pengendalian perumahan dan fasilitas permukiman sesuai dengan penataan ruang kota
Meningkatnya kebersihan wilayah kota	Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kawasan perumahan dan permukiman	Penataan, pengembangan, pengendalian perumahan dan fasilitas permukiman sesuai dengan penataan ruang kota
Meningkatnya kualitas	Meningkatnya ketataan	Peningkatan pengelolaan persampahan	Pengurangan dan Penanganan Sampah
Meningkatnya kualitas	Meningkatnya ketataan	Meningkatkan daya dukung dan daya	Peningkatan upaya perlindungan, dan

Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban			
Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
lingkungan hidup	terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	tampung lingkungan hidup Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan terhadap regulasi penataan ruang	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Tata Ruang

3.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Berdasarkan peraturan tersebut Tugas dan Fungsi Dinas adalah sebagai berikut :

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi, dan Bidang Pertanahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum , penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
 - c. Pengawasan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dari gambaran umum mengenai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda yang meliputi Visi, Misi, disertai dengan strategi dan arah kebijakan dan dengan struktur dan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, maka dapat ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Tabel 4.1 :

Tabel 4.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
TAHUN 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
					3	6		
1	Meningkatkan upaya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air	3 Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	4 %	5 RPJMD	6 Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) dibagi Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) dikali 100%	7 Bidang Sumber Daya Air	8	
2	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	RPJMD	Luas irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) dibagi Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dikali 100%	Bidang Sumber Daya Air		
3	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	SPM	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kota tersebut dikali 100%	Bidang Cipta Karya		
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	SPM	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di kota dikali 100%	Bidang Cipta Karya		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
					Formulasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	RPJMD	Jumlah Infrastruktur persampahan yang dibangun dibagi Jumlah total rencana persampahan yang dibangun dikali 100%	Bidang Cipta Karya		
5	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	RPJMD	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah IMB yang berlaku dikali 100%	Bidang Cipta Karya		
6	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga	%	RPJMD	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota dikali 100%	Bidang Bina Konstruksi		
7	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan pusat produksi ke pusat kegiatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	%	RPJMD	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap (baik dan sedang) dibagi Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota dikali 100%	Bidang Bina Marga		
8	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	RPJMD	Indek Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang) + (Indek Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal) dibagi 2 (dua)	Bidang Penataan Ruang		
9	Meningkatnya Pemanfaatan tanah sesuai dengan izin yang diterbitkan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	%	RPJMD	Luas Tanah sesuai peruntukan izin lokasi dibagi seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi dikali 100%	Bidang Pertanahan		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
					3	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
10	Meningkatnya Penyediaan lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	RPJMD	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dibagi Jumlah Kebutuhan Tanah untuk pembangunan fasilitas umum dikali 100% Luas Tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah dibagi Luas Izin Membuka tanah yang di terbitkan dikali 100%	Bidang Pertanahan		
			%	RPJMD	Jumlah Sengketa Tanah garapan yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan dikali 100%	Bidang Pertanahan		

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	35,13%	40%	45%	50%	55%
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76%	82%	88%	94%	100%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78%	78,14%	78,35%	78,56%	78,78%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,98%	1%	1,5%	1,7%	1,8%
5	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%	25%	50%	75%	100%
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1,6%	2,73%	3,87%	5,01%	6,14%
7	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,1%	10%	11,9%	13,81%	14,71%
8	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	60%	65%	70%	75%	80%
9	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	72,72%	74,18%	75,7%	75,7%	75,7%
11	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,51%	51,79%	52,07%	52,37%	52,37%

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
13	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya didalam menghadapi persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda didalam menentukan keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi serta Program dan kegiatan yang realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari OPD.

Semoga Indikator Kinerja Utama ini dapat menjadi manfaat didalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
TAHUN 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	Meningkatkan upaya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air	3 Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	4 %	5 RPJMD	6 Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) dibagi Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) dikali 100%	7 Bidang Sumber Daya Air	8
2	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	RPJMD	Luas irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi danelihara (ha) dibagi Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dikali 100%	Bidang Sumber Daya Air	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	SPM	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kota tersebut dikali 100%	Bidang Cipta Karya	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	SPM	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di kota dikali 100%	Bidang Cipta Karya	
4	Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	RPJMD	Jumlah Infrastruktur persampahan yang dibangun dibagi Jumlah total rencana persampahan yang dibangun dikali 100%	Bidang Cipta Karya	
5	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	RPJMD	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah IMB yang berlaku dikali 100%	Bidang Cipta Karya	
6	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	RPJMD	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota dikali 100%	Bidang Bina Konstruksi	
7	Meningkatnya konektivitas jaringan pusat produksi ke pusat kegiatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	%	RPJMD	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap (baik dan sedang) dibagi Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota dikali 100%	Bidang Bina Marga	
8	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	RPJMD	Indek Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang) + (Indek Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal) dibagi 2 (dua)	Bidang Penataan Ruang	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Meningkatnya Pemanfaatan tanah sesuai dengan Izin yang diterbitkan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	%	RPJMD	Luas Tanah sesuai peruntukan izin lokasi dibagi seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi dikali 100%	Bidang Pertanahan	
10	Meningkatnya Penyediaan lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	RPJMD	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dibagi Jumlah Kebutuhan Tanah untuk pembangunan fasilitas umum dikali 100%	Bidang Pertanahan	
		Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	%	RPJMD	Luas Tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah dibagi Luas Izin Membuka tanah yang di terbitkan dikali 100%	Bidang Pertanahan	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	RPJMD	Jumlah Sengketa Tanah garapan yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan dikali 100%	Bidang Pertanahan	

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	35,13%	40%	45%	50%	55%
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76%	82%	88%	94%	100%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78%	78,14%	78,35%	78,56%	78,78%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,98%	1%	1,5%	1,7%	1,8%
5	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%	25%	50%	75%	100%
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1,6%	2,73%	3,87%	5,01%	6,14%
7	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,1%	10%	11,9%	13,81%	14,71%
8	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	60%	65%	70%	75%	80%
9	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	72,72%	74,18%	75,7%	75,7%	75,7%
11	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,51	51,79	52,07	52,37	52,37

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
13	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%

Samarinda, 2 Januari 2022

Kepala,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Samarinda



Ir. Hero Mardanus Satyawan, M.T
NIP. 19660330 199303 1 006

**PENETAPAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Rasio Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	40.00%	%		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	378,288,186,842
			1	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	7,140,550,000
			8000	meter	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	110,373,613,204
			20,000	meter	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	239,366,065,638
			20,000	meter	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	21,407,958,000
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	82	%		
					Program Pengelolaan SDA	109,226,631,270
			0.1	Km	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	17,950,000,000
			1	Unit	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	76,300,000,000
			5	Unit	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	1,250,000,000
			4	Unit	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	2,240,000,000
			1	Unit	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1,500,000,000
			11	Dokumen	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan	1,100,000,000
			1	Km	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3,100,000,000
			2	Km	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2,636,631,270
			13	Unit	Operasional Unit Pengelola Irigasi	150,000,000
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten/Kota	78,14	%		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	70,739,106,345
			1	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1,523,385,000
			5	Ltr/dtk	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	20,170,033,685
			10	Ltr/dtk	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	7,790,687,660
			100	SR	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	41,255,000,000
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan SPALD	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1	%		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,286,599,450,662
			1	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	1,700,000,000
			45	Rumah Tangga	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1,900,000,000
			50	Rumah Tangga	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3,297,000,000
			100	Septic Tank	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	300,000,000
			25	M3/Hr	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	386,450,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7			
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah melalui Infrastruktur Persampahan	Persentase Infrastruktur Persampahan yang Dibangun	25	%					
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	26,854,625,000			
			2	Dokumen	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	144,600,000			
			900	RT	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan kab/Kota	3,460,025,000			
			60	Unit	Penyediaan Sarana Persampahan	23,250,000,000			
5	Meningkatnya Ketaatan terhadap Regulasi dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	2,73	%					
					Program Penataan Bangunan Gedung	397,531,970,777			
			2	Dokumen	Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	2,207,550,000			
			3	Dokumen	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	387,974,420,777			
			10	Unit	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	7,350,000,000			
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200,000,000			
			2	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	200,000,000			
					Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	10	%		
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi			1,700,000,000	
			190	Orang	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	450,000,000			
			190	Orang	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	450,000,000			
			1	Dokumen	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	100,000,000			
			1	Dokumen	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	200,000,000			
			100	Orang	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	200,000,000			
			1	Laporan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	300,000,000			
6	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dari Pusat Produksi ke Pusat Kegiatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	65						
					Program Penyelenggaraan Jalan	602,079,457,122			
			2	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	7,894,000,000			
			500	m2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	12,102,300,000			
			5	Dok	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200,000,000			
			2,000	Meter	Pembangunan Jalan	87,862,500,000			
			2,000	Meter	Rehabilitasi Jalan	304,733,570,827			
			15	Meter	Pembangunan Jembatan	5,909,256,595			
			200	Meter	Pembangunan Terowongan/Tunnel	132,156,047,000			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
			15	Meter	Rehabilitasi Jembatan	18,700,000,000
			100	Meter	Pemeliharaan Rutin Jembatan	5,000,000,000
			1,000	Meter	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	27,521,782,700
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	%		
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4,652,000,000
			3	Dokumen	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	900,000,000
			2	Dokumen	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	900,000,000
			2	Kecamatan	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	290,000,000
			2	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	885,000,000
			1	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan pembangunan Daerah	640,000,000
			1	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	645,000,000
			1	Dokumen	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	392,000,000
8	Meningkatkan Pemanfaatan tanah sesuai dengan izin yang diterbitkan	Persentase Luas Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukan Tanah pada Ijin yang diterbitkan	74,18	%		
9	Meningkatnya Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,79	%		
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	%		
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	%		
					Program Pengelolaan Izin Lokasi	50,000,000
			9	SK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	50,000,000
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	45,000,000
			1	Laporan	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	45,000,000
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	78,106,253,000
			5	Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78,106,253,000
					Program Pengelolaan tanah Kosong	30,000,000
			1	Dok	Pelaksanaan Inventarisasi tanah Kosong	30,000,000
					Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	975,000,000
			56	Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	975,000,000
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27,283,694,432
			3	Dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000
			1	Dok	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000
			4	Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000
			135	Orang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,691,362,777
			156	Orang	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,994,707,596
			1	Dok	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000
			2	Kebijakan	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	20,000,000
			3	Laporan	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20,000,000
			2	Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49,957,400
			2	Jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,050,000,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
			2	Jenis	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000
			4	Dok	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	147,000,000
			4	Laporan	Fasilitas Kunjungan Tamu	22,000,000
			60	SPPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,187,128,000
			4	Unit	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131,452,500
			1	Unit	Pengadaan Mebel	550,000,000
			36	Bukti Pembayaran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	774,775,700
			4	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	20,000,000
			1	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,400,000
			145	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,179,157,248
			24	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	278,239,500
			4	Gedung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	966,513,711

